Perekrutan Guru di Indonesia

Disfungsi Kelembagaan dan Dinamika Sosial

Guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Namun, **kinerja guru di Indonesia belum maksimal.**

Kualitas guru masih perlu ditingkatkan

Hasil Uji Kompetensi Guru di bawah target rata-rata

(Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2019)

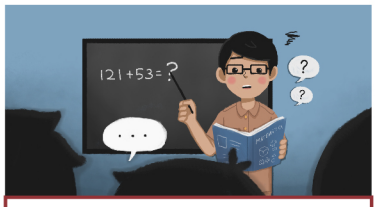

Proses pengajaran tidak efektif

Pembelajaran tidak berlangsung dengan efektif

(Sumber: *Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making*)

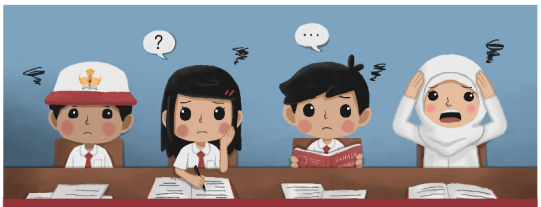

Hasil pembelajaran siswa Indonesia masih perlu ditingkatkan

Skor PISA Indonesia di bawah rata-rata OECD

(Sumber: *PISA 2018 Results, Indonesia Country Note*)

Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan guru. Namun, upaya tersebut tidak berdampak signifikan bagi guru-guru yang kompetensinya sangat rendah.

Salah satu hal yang kerap luput dari pembahasan terkait kualitas guru adalah masalah perekrutan guru. **Perekrutan guru yang efektif dapat menjaring calon-calon guru terbaik yang berkompetensi tinggi.**

Metodologi

Untuk mencari tahu akar masalah sulitnya merekrut guru-guru berkualitas baik di Indonesia, Program RISE di Indonesia mengkaji proses perekrutan guru di Indonesia.

Menelaah peraturan perundang-undangan

Melakukan wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan yang terlibat maupun terkait dengan perekrutan guru

Temuan

Ada 3 faktor yang menyebabkan sulitnya merekrut guru-guru berkualitas baik di Indonesia:

Kelembagaan

Pembagian kewenangan untuk perekrutan guru antarkementerian maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih tumpang-tindih.

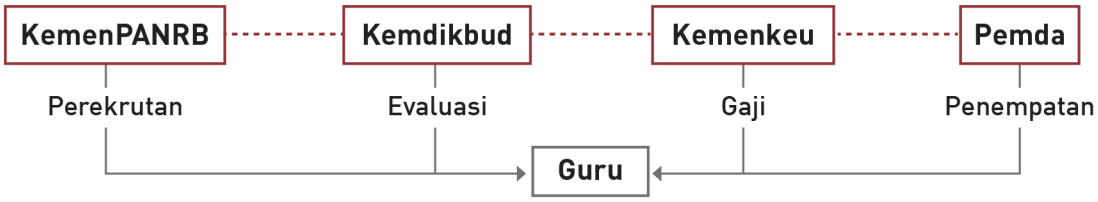

--- = koordinasi antarlembaga lemah karena setiap lembaga memiliki objektif berbeda

Ekonomi Politik

Proses perekrutan guru yang berkualitas baik sulit tercapai karena tersita kepentingan ekonomi politik berbagai pihak: politisi, kementerian, dinas pendidikan, kepala sekolah, dan persatuan guru.

Dinamika Sosial

- Guru menganggap status PNS adalah jaminan kesejahteraan
- Proses perekrutan guru sebagai bagian dari perekrutan PNS secara umum mengutamakan pentingnya wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum daripada kecakapan mengajar
- Adanya anggapan dari calon guru baru bahwa tidak perlu pintar menjadi guru, bisa memulai sebagai guru honorer dan nantinya akan diangkat menjadi PNS

Area untuk Perubahan

Standar mengajar yang lebih realistis

Ketika merekrut guru, indikator yang harus diperhatikan adalah guru harus memiliki kompetensi mengajar yang baik dan efektif, bukan sekadar nasionalis dan loyal.

Kepemimpinan politik yang menekankan pentingnya guru profesional

Kepemimpinan politik harus mengutamakan tujuan pendidikan daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya:

- Tidak mempromosikan guru honorer berkinerja rendah menjadi PNS dengan tujuan ingin menjaring suara saat pemilu
- Tidak menjadikan perekrutan guru honorer sebagai "ajang menitipkan" kandidat calon PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Proses perekrutan guru perlu dibedakan dari proses perekrutan PNS pada umumnya

Semua guru CPNS perlu menjadi guru honorer dulu untuk jangka waktu tertentu (*probation*)	→	Hanya guru honorer yang lulus *probation* dan berkinerja sangat baik yang dapat mengikuti seleksi PNS (dengan kuota tertentu)

Dengan proses perekrutan seperti ini, tidak akan ada lagi guru PNS yang nol pengalaman mengajar karena sebelum diangkat menjadi PNS, setiap guru sudah pernah menjalani *probation* (menjadi guru honorer).

© 2020 Program RISE di Indonesia. Hak cipta dilindungi undang-undang.